KRITIS, Vol. XXIX No. 2, 2020: 102-119

PERAN PEMERINTAH DESA KEDITAN DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA

Lestari Oktalion Lili
Program Studi D4 Destinasi Pariwisata, Fakultas Interdisiplin
Universitas Kristen Satya Wacana
Email: 732016010@student.uksw.edu

Aldi Herindra Lasso
Program Studi D4 Destinasi Pariwisata, Fakultas Interdisiplin
Universitas Kristen Satya Wacana

Abstract

Tourism is one of the vital economic sectors for local communities in Indonesia this makes the tourism development in every region is growing rapidly. However, there are obstacles faced during the development, so it requires interventions from local government to assist and support the local people. Using a qualitative approach, this research aims to examine the role of the village government in Keditan Village, District of Ngablak, Magelang Regency, in increasing support of people towards the ongoing tourism development. The result of the research shows that the government of Keditan have taken the role in supporting the people, but such role is not yet optimal. Researcher sees that it needs some further mentoring from stakeholders to support the village government to implement that role.

Keywords: The Role of Government; Community Involvement; Community Based Tourism.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian. Pariwisata juga dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan wilayah khususnya di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan banyak objek pariwisata yang tersebar di provinsi-provinsi, sehingga perkembangan sektor pariwisata di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari hasil percepatan pembangunan infrastruktur dan prediksi jumlah kedatangan wisatawan mancanegara di Bali yang mencapai angka 8 juta jiwa pada tahun 2019 (Rukini *et al*, 2015). Selain itu, pariwisata Indonesia berhasil naik ke peringkat 50 dari urutan 141 negara (*World Economy Forum*, 2015). Tidak hanya itu pemerintah Indonesia juga menargetkan kunjungan wisata pada tahun 2019

mencapai 20 juta jiwa untuk wisatawan mancanegara dan pergerakan 275 jiwa bagi wisatawan nusantara dengan indeks daya saing pariwisata Indonesia menempati peringkat 30 (Abdullah dan Ridha, 2019). Kebijakan pemerintah yang sedang mengembangkan perekonomian melalui pariwisata tidak sedikit dari masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Salah satu contoh di Nusa Lembongan yang terletak di Bali. Dengan demikian, pariwisata sangat berperan dalam perkembangan perekonomian suatu daerah. Dalam perkembangan pariwisata sangat dibutuhkan pendekatan pembangunan pariwisata yang memprioritaskan dukungan dan partisipasi masyarakat dengan membuat konsep CBT (*Community Based Tourism)*. CBT merupakan bentuk pariwisata yang dikelola oleh masyarakat lokal dengan tujuan keberlanjutan pariwisata.

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat atau yang juga dikenal dengan CBT *(Community Based Tourism)* yang merupakan sebuah cara pendekatan untuk melibatkan masyarakat sebagai pelaku yang penting dalam pembangunan pariwisata seperti yang dinyatakan oleh Sastrayuda (2010). Dengan melakukan pendekatan untuk melibatkan masyarakat berperan penuh baik dalam pengambilan keputusan bahkan mempengaruhi dan memberikan manfaat untuk lingkungan serta kehidupan masyarakat lokal itu sendiri. Selain itu, Bruno (2019) juga berpendapat bahwa pariwisata berbasis masyarakat merupakan partisipasi dari masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata merupakan faktor penentu keberlanjutan pembangunan destinasi pariwisata.

Konsep pariwisata berbasis masyarakat ini di dalamnya terkandung konsep untuk pemberdayaan masyarakat dan upaya pemberdayaan masyarakat ini dihubungkan dengan karakteristik sebagai suatu komunitas dengan latar belakang dan pemberdayaan masyarakat seperti menciptakan kondisi atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Pembangunan pariwisata dengan masyarakat lokal tidak dapat dipisahkan karena tanpa masyarakat pembangunan pariwisata tidak dapat berjalan dengan baik. Munawaroh (2017) menyatakan bahwa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melibatkan perencanaan, pengorganisasian dan pengembangan berbagai aktivitas program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat serta membina kemandirian masyarakat, baik itu secara ekonomi, sosial maupun politik. Pada era saat ini pariwisata juga membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dengan membangun wisata yang berkelanjutan dan menyesuaikan dengan kondisi sosial yang ada.

Desa wisata adalah sebuah kawasan khusus pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik seperti tradisi budaya, atraksi, dan alamnya sehingga dapat dijadikan sebagai tempat tujuan wisata. Dengan adanya adanya desa wisata

diharapkan partisipasi aktif dari dari masyarakat lokal karena masyarakat sebagain pembangun bahkan pengelola Desa wisata tersebut. Di Indonesia ada beberapa Desa wisata yang cukup sukses menerapkan CBT dalam pembangunan pariwisatanya. Contohnya Desa Ngalanggeran, kec Patuk, Kab Gunungkidul, D.I Yogyakarta tahun 2017 yang mendapatkan sebuah penghargaan CBT *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) karena menerapkan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa masyarakat terlibat penuh dalam pembangunan pariwisata.

Masyarakat merupakan elemen penting dalam pariwisata untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat setempat meskipun banyak masyarakat yang pola pikirnya berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam penerapan CBT, masyarakat juga membutuhkan intervensi pihak lain, seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat atau industri pariwisata lainnya. Pihak-pihak ini dapat melakukan banyak hal dalam mendukung masyarakat seperti yang dinyatakan Prasetya & Rani (2014) dalam upaya melibatkan masyarakat dalam pembangunan pariwisata, tetap diperlukan campur tangan/bantuan dari pihak luar.

Pentingnya Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pembangunan pariwisata tidak terlepas dari pemerintah lokal dan *stakeholder* eksternal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), instansi-instansi dan industri lainnya. Tetapi di antara semua stakeholder tersebut pemerintah lokal memegang peranan yang cukup krusial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah lokal yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan ada dalam masyarakat serta pemerintah lokal juga berperan sangat penting untuk membantu masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Menurut Simpson (2007) ada beberapa peranan pemerintah dalam pembangunan pariwisata, yaitu;

Pelatihan Keterampilan dan Peningkatan Kapasitas

Pelatihan pariwisata merupakan peran dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Dalam pelatihan ini pemerintah desa lebih mendorong masyarakat dan melihat antusias masyarakat dalam mengikuti pelatihan yang diadakan. Peran pemerintah tersebut menjadi strategi untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat agar pembangunan pariwisata berjalan sesuai tujuan yang ditentukan Simpson (2007).

Kebijakan/Peraturan tentang Ketenagakerjaan Pariwisata dan Lingkungan

Kebijakan/peraturan tentang ketenagakerjaan Pariwisata dan Lingkungan merupakan salah satu peran pemerintah desa dalam membangun pariwisata.

Simpson (2007) menyatakan bahwa peranan pemerintah dalam membuat kebijakan dan memberikan wewenang kepada masyarakat untuk terlibat menjadi ketenagakerjaan dalam pariwisata. Adapun peran pemerintah untuk mendampingi dan membentuk struktur pengelolaan pariwisata. Hal ini juga dikatakan oleh (Hall, 1999; UNWTO, 1998, 2005) pemerintah perlu menciptakan peluang dan mendorong masyarakat untuk ikut terlibat dalam ketenagakerjaan tersebut.

Penyediaan Lahan Pembangunan Pariwisata

Dalam pembangun lahan pariwisata merupakan suatu hal yang tidak bisa diabaikan karena untuk membangun pariwisata perlu di sediakan lahan yang cukup luas dan memiliki potensi yang tinggi. Selain itu, lahan untuk pembangunan pariwisata telah ditentukan oleh pemerintah desa dan juga pemangku kepentingan lainnya. Simpson (2007) menyatakan bahwa pemangku kepentingan dan pemerintah juga mempunyai wewenang dalam menentukan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Selain itu, peran masyarakat juga menjadi faktor penentu dalam menentukan lahan yang dijadikan tempat wisata. Sehingga lahan yang telah ditentukan dapat digunakan dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan bukan dalam waktu yang singkat.

Kerangka kerja Kebijakan dan Peraturan

Kerangka kerja merupakan suatu acuan sebagai konsep dalam sebuah pembangunan yang dilaksanakan. Namun, dalam pembentukan kerangkakerja pemerintah desa perlu membuat program-program perencanaan untuk pariwisata yang berkelanjutan. Namun, dalam pembentukan kerangka kerja pemerintah desa perlu bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam pariwisata agar dapat membantu dalam menentukan sebuah program kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, kerangka kerja yang di buat dapat dijadikan.

Penyediaan Infrastruktur dan Komunikasi pemerintah dengan masyarakat

Infrastruktur merupakan salah pendukung dalam pembangunan pariwisata dan juga termasuk dalam peran dari pemerintah. Dalam lingkup ini pemerintah membantu dalam menyediakan infrastruktur untuk pariwisata. Selain itu, pemerintah lokal berperan dalam membangun komunikasi atau hubungan yang baik dengan masyarakat agar pemerintah dengan masyarakat lebih dekat. Komunikasi atau hubungan yang baik juga dapat menjadi sebuah strategi untuk mencapai sebuah tujuan bersama dalam pengambilan keputusan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman satu dengan yang lain.

Pemasaran Pariwisata

Pemasaran dalam pariwisata adalah salah satu komponen yang tidak bisa diabaikan karena dengan adanya pemasaran pariwisata yang dibangun dapat dikenal oleh banyak orang. Simpson (2007) mengatakan bahwa internet dapat memberikan peluang yang besar untuk pemasaran. Pemasaran ini termasuk salah satu peran pemerintah desa dengan membuat strategi untuk pemasaran serta melibatkan masyarakat. Dengan demikian, langkah pemerintah dengan melibatkan masyarakat dalam pemasaran dapat menjadikan masyarakat untuk lebih belajar dalam konsep pemasaran. Selain itu, pemasaran yang dapat dilakukan dalam lingkup kecil yang biasa dilakukan oleh masyarakat lokal yaitu melalui mulut ke mulut *(offline)* tetapi seiring berjalannya waktu perkembangan informasi semakin maju sehingga pemasaran dapat dilakukan dengan *(online)* dengan melalui sosial media seperti *Instagram, facebook, website*, dan juga *blog.* Berdasarkan hal tersebut pemasaran sangat membantu dalam pembangunan pariwisata karena dengan bertambahnya kunjungan wisatawan dapat menambah perekonomian masyarakat.

Penyediaan Layanan Sosial dan Lingkungan serta Pembuangan Limbah Energi dan Air

Dalam pembangunan pariwisata penyediaan layanan sosial dan lingkungan serta pembuangan limbah energi dan air termasuk fasilitas pendukung pariwisata. Penyediaan layanan tersebut juga penting karena untuk kenyamanan wisatawan serta melakukan pembangunan dengan tetap menjaga lingkungan sekitar. Penyediaan layanan tersebut merupakan suatu peran dari pemerintah desa di mana pemerintah desa menyediakan layanan-layanan tersebut dengan membangun kerjasama dengan, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), LSM, Pemuda desa, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk membantu dalam penyediaan dan penerapan layanan tersebut dalam pariwisata. Penyediaan layanan ini juga dapat dikatakan progress dari kerangkakerja, karena dalam perencanaan pembangunan pariwisata hal ini termasuk dalam konsep pariwisata.

Layanan Informasi

Layanan informasi dalam mendukung pariwisata merupakan suatu peranan pemerintah untuk mendukung pariwisata. Sehingga layanan informasi ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana untuk membantu masyarakat dalam memberikan informasi kepada musyarakat setempat. Adapun sebaliknya layanan informasi ini dapat juga membantu wisatawan yang berkunjung ketempat wisata untuk mendapat informasi tentang wisata yang di Desa Keditan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa layanan informasi ini dapat membantu dalam bentuk layanan *online* dan *offline* contoh dari layanan *online* ialah dengan kantor

informasi, pengelola. Sedangkan layanan *offline* dapat berupa sosial media *(Instagram, web, facebook).* Dengan adanya layanan tersebut dapat membantu pariwisata untuk lebih dikenal lagi oleh orang banyak.

Kolaborasi dengan Stakeholder

Simpson (2007) menyatakan bahwa dalam pembangunan pariwisata perlu ada kolaborasi dengan beberapa pihak salah satunya pemerintah desa. Untuk membangun pariwisata yang baik dan berhasil yaitu membangun kolaborasi dengan pihak-pihak yang memahami tentang dunia pariwisata. Hal tersebut merupakan suatu hal yang baik karena dapat membantu berjalannya pembangunan pariwisata baik itu pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, pemuda desa, PKK, dan di tingkat Kabupaten serta kolaborasi juga di kampus-kampus. Dari beberapa stakeholder tersebut dapat dikatakan bahwa membangun dengan stakeholder perlu ditingkatkan lagi.

Pendanaan untuk Pembangunan Pariwisata

Pendanaan untuk pembangunan pariwisata khususnya di Desa Keditan merupakan peran dari pemerintah. Menurut (Ashley, 1998; Poultney dan Spanceley, 2001) menyatakan bahwa pemerintah berkontribusi dalam pembangunan dan membuat pendanaan. Dengan demikian dapat dikatakan pendanaan tersebut sebagai salah satu penentu berjalannya pembangunan pariwisata sehingga pemerintah memiliki peran penuh dalam membuat pendanaan untuk pariwisata yang berkelanjutan. Sehingga pendanaan ini perlu adanya transparansi kepada masyarakat melalui program kerja yang ada di desa seperti dalam bentuk infrastruktur yang sudah di bangun atau diperbaiki agar tidak terjadi kesalah pahaman antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Kondisi di mana masyarakat membutuhkan dukungan pemangku kepentingan dari luar banyak ditemui di destinasi-destinasi yang baru kembangkan. Mengapa? Karena masyarakatnya mendukung dalam pariwisata yang perlu ditingkatkan melalui kapasitas, peningkatan pengetahuan tentang pariwisata.

Desa Keditan di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang saat ini dalam tahap pembangunan untuk menjadi Desa Wisata. Konsep desa wisata merupakan bentuk pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Di mana Desa Keditan ini memiliki potensi untuk dijadikan sebagai Desa Wisata karena memiliki sumber daya alam, lingkungan, tradisi dan budaya yang masih terjaga sampai saat ini. Salah satu potensi yang dimiliki ialah kampung pinus dan bertemakan alam yang masih alami tetapi wisata tersebut masih dalam tahap pembangunan. Dengan adanya pembangunan pariwisata dukungan dan partisipasi masyarakat menjadi

hal yang penting. Namun sebagian dari masyarakat yang masih belum memahami konsep wisata yang akan dibangun, bahkan ada juga masyarakat yang benar-benar belum memahami tentang pariwisata. Melihat kondisi tersebut, diperlukan peran pemerintah untuk di analisis lebih lanjut mengenai pemahaman dan dukungan masyarakat desa terhadap pembangunan pariwisata. Penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana pemerintah Desa Keditan melakukan peran dalam upaya mendukung dan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan Desa Keditan dengan untuk menjadi di Desa Wisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Keditan Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang.Desa terdiri dari empat dusun, alasan peneliti memilih Desa Keditan sebagai lokasi penelitian karena Desa Keditan merupakan desa yang sedang mengarahkan pembangunannya ke bidang pariwisata. Oleh karena itu sangat dibutuhkan dukungan semua pihak untuk mewujudkannya dan peran pemerintah lokal termasuk menjadi salah satu faktor yang penting. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini perupakan pendekatan penelitian kualitatif. Gulo (2002) menyatakan metode kualitatif merupakan metode ini menekankan pada aspek secara mendalam *(in-depth analysis)* terhadap suatu masalah, dan mengkaji masalah secara khusus.

Peneliti memilih data kualitatif karena peneliti tinggal di Desa Keditan dan dapat secara langsung berkomunikasi dengan masyarakat di desa, sehingga dapat memperoleh data yang sesuai dengan metode yang dipilih dan melakukan interview mendalam tentang peran pemerintah terhadap pembangunan pariwisata dengan beberapa Pemerintah Desa dan masyarakat yang ada di Desa Keditan. Metode yang di gunakan adalah metode deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan keadaan di lapangan. Penelitian ini meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, dan suatu kondisi peristiwa (Ali *et al*, 2007). Hal ini dilakukan untuk menganalisis dan mengidentifikasi peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata.

Observasi

Observasi menurut (Bruno, 2019) yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti itu bisa secara langsung melakukan pengamatan objek untuk melihat langsung kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini data yang didapat oleh peneliti itu adalah data yang fakta karena peneliti langsung mengetahui yang terjadi di lapangan dan peneliti melihat langsung kegiatan yang terjadi di Desa Keditan.

Wawancara

Wawancara Menurut (Oliver, 2013) yaitu dengan melakukan percakapan tertentu, dalam metode ini peneliti dapat merespon serta berhadapan langsung (tatap muka) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkan tujuan yang dapat menjelaskan masalah yang akan diteliti. Data wawancara yang didapatkan mulai dari lima sampai delapan orang yang di interview dari keempat dusun yang ada di Desa Keditan. Dengan teknik ini peneliti bisa mengumpulkan data dengan metode wawancara kepada beberapa perangkat Desa dan beberapa masyarakat di Desa Keditan.

Teknik Analisis

Teknik analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara dan observasi dengan cara mengelompokkan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari untuk membuat kesimpulan agar mudah dipahami. (Bruno, 2019)

HASIL PENELITIAN

Kondisi Umum Dukungan Masyarakat Desa Keditan Terhadap Pariwisata

Dalam pembangunan pariwisata dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan karena peran dari masyarakat juga tidak dapat dipisahkan dari pariwisata. Contohnya di Desa Keditan saat ini yang sedang dalam tahap pembangunan pariwisata, di mana dalam tahap pembangunan masyarakat tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari masyarakat dan semua pihak terkait, khususnya pemerintah desa. Desa Keditan terbagi atas empat dusun dan masyarakat dari keempat dusun tersebut telah mengetahui adanya pembangunan pariwisata dan masyarakat dari semua dusun mendukung adanya pembangunan pariwisata. Selain itu, Masyarakat Desa Keditan juga bersedia untuk dilibatkan dalam pembangunan tersebut, namun sebagian besar masyarakat Desa Keditan masih memiliki wawasan yang masih kurang mengenai pariwisata, sehingga menyebabkan sumber daya manusia berkurang. Adapun faktor lainnya yaitu masyarakat Desa Keditan sebagian besar berprofesi sebagai petani sehingga menghambat masyarakat untuk mengikuti kegiatan pariwisata. Beda halnya dengan masyarakat yang sudah memahami tentang pariwisata dengan memberikan bentuk dukungan melalui usaha rumahan yang dibuat dari hasil kebun sendiri. Berdasarkan kondisi tersebut, peran pemerintah lokal menjadi salah satu faktor penting yang menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan pariwisata di desa ini.

Peran Pemerintah Desa Keditan dalam Pembangunan Pariwisata

Pembangunan pariwisata melibatkan beberapa *stakeholder,* salah satunya pemerintah desa di Desa Keditan yang saat ini dalam tahap pembangunan pariwisata. Dalam pembangunan tersebut perlu adanya peran pemerintah desa untuk membuat perencanaan serta kebijakan pariwisata dan memberikan wawasan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan wisata. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah desa memiliki beberapa peran untuk mendukung pembangunan pariwisata khususnya di Desa Keditan, antara lain:

Pelatihan Keterampilan dan Peningkatan Kapasitas

Desa Keditan saat ini masih dalam tahap pembangunan dan masyarakat yang ada di desa masih memerlukan banyak pengetahuan tentang pariwisata. Dengan demikian, perlu diadakan pelatihan pariwisata dan keterampilan bagimasyarakat di Desa Keditan. Hasil observasi di Desa Keditan pelatihan pariwisata sudah pernah dilakukan beberapa kali dan diadakan tahun 2019 tentang bagaimana membangun pariwisata yang baik, kemudian membuat sebuah perencanaan untuk pariwisata serta materi mengenai pengelolaan pariwisata. Selain itu, observasi peneliti juga melakukan wawancara kepada perangkat Desa Keditan yang berpendapat sama dengan hal tersebut. Namun, dari semua perangkat desa ada salah satu yang berpendapat bahwa belum pernah dilaksanakan pelatihan pariwisata di Desa Keditan. Selain itu, dari sudut pandang salah satu masyarakat juga berpendapat yang sama. Hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa ada perbedaan pendapat sesama perangkat desa dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan masih ada masyarakat yang belum terlalu mengetahui kegiatan pariwisata yang sudah pernah dilaksanakan di desa.

Pelatihan yang dilaksanakan melibatkan beberapa pihak yaitu: masyarakat, Kecamatan, Pokdarwis, perangkat desa dan Kampus Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Pelaksanaan pelatihan tersebut langsung didampingi serta diberikan materi dari kampus UKSW. Hubungan Desa Keditan dengan kampus UKSW terbangun karena dari kecamatan memperkenalkan Desa Keditan dengan pihak UKSW. Selain itu, Desa Keditan berencana untuk membangun desa wisata. Pelatihan yang diadakan di Desa Keditan mengenai penggunaan dana untuk kegiatan pelatihan beberapa kali dari UKSW dan desa yang menyediakan keperluan yang dibutuhkan dengan memberikan fasilitas tempat untuk dilaksanakannya pelatihan. Tujuan diadakannya pelatihan ini agar masyarakat memahami dan mempunyai gambaran tentang pariwisata serta meningkatkan dalam pembangunan tersebut. Kegiatan pelatihan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik, namun ada kendala yang dialami saat pelaksanaan

pelatihan karena masyarakat Desa Keditan rata-rata petani sehingga masyarakat yang diundang untuk hadir dalam pelatihan membuat pelatihan sedikit terhambat dan beberapa dari masyarakat tidak hadir dalam pelatihan tersebut.

Kebijakan/Peraturan tentang Ketenagakerjaan Pariwisata dan Lingkungan

Kebijakan dan peraturan tentang ketenagakerjaan pariwisata dan lingkungan merupakan hal penting. Pariwisata di Desa Keditan saat ini sedang dalam tahap pembangunan dan membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola pariwisata dan lingkungan. Namun, saat ini belum ada kebijakan/peraturan tentang ketenagakerjaan pariwisata dan lingkungan. Hasil wawancara yang dilakukan kepada perangkat desa yaitu bapak Lurah Desa Keditan mengatakan mengenai kebijakan dan peraturan pariwisata dan lingkungan belum ada sehingga akan diadakan pendampingan wisata. Selain itu, perangkat desa lainnya juga mengatakan hal yang sama. Sehingga untuk kedepannya akan membuat rencana untuk kebijakan.

Selain itu, dari sudut pandang masyarakat mengatakan bahwa mengenai ketenagakerjaan pariwisata sudah ada, tetapi belum memiliki kelanjutan dan kejelasan. Dalam lingkup lingkungan pemuda desa dengan sukarela terlibat dalam menjaga lingkungan. Berdasarkan dari sudut pandang perangkat desa dan masyarakat memiliki pendapat yang sama mengenai kebijakan/peraturan ketenagakerjaan pariwisata dan lingkungan.

Lahan untuk Pembangunan Pariwisata

Pembangunan pariwisata di Desa Keditan berdasarkan observasi wawancara terlihat ketika peneliti yang langsung melihat lahan atau lokasi tempat yang akan dibangun untuk dijadikan tempat pariwisata. Lokasi tersebut berada di dusun Katonan. Hal tersebut membuktikan bahwa dari hasil wawancara dengan perangkat desa yang mengatakan "*sudah ada dan beberapa titik yang mau kita jadikan wisata dan kita sudah membangun sekitar 10% tetapi karena adanya pandemi Covid-19 ini akhirnya beberapa kegiatan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Masyarakat di mana pihak desa mengatakan bahwa untuk tempatnya kita sudah ada dan juga sudah mempersiapkan tempatnya bahkan untuk rancangannya pun sudah dan alhamdulillah kita ambil dari pihak UKSW*". Sedangkan dari sudut pandangmasyarakat mengatakan bahwa untuk lahan atau lokasi sudah dipersiapkan untuk dijadikan tempat pembangunan pariwisata bahkan sejauh ini pembangunan masih dalam proses. Sehingga dapat disimpulkan mengenai lahan untuk pembangunan pariwisata di Desa Keditan sudah ditentukan dan sedang dalam tahap pembangunan.

Kerangkakerja Kebijakan dan Keraturan

Pembangunan pariwisata di Desa Keditan masih dalam tahap untuk pembentukan kerangka kerja kebijakan peraturan sudah ada. Menurut perangkat desa "kalau untuk Kerangkakerja sudah kita buat bagaimana nanti masukannya inkes yang kita sudah rencanakan. Semoga harapannya kasus ini terselesaikan dan nanti kita lanjutkan". Akan tetapi, dari salah satu masyarakat yaitu ibu Yani bahwa "kerangkakerja untuk Desa Keditan saat ini memang belum ada akan tetapi kerangkakerjanya masih dalam tahap konsep dan untuk kelanjutan pembangunan pariwisata masih dalam tahap pelaksanaan. Kerangkakerja di Desa Keditan masih dalam bentuk konsep sehingga dari konsep tersebut pemerintah desa sudah melakukan pembangunan secara bertahap.

Penyediaan Infrastruktur dan Komunikasi Pemerintah dengan Masyarakat

Infrastruktur dalam pariwisata juga hal yang sangat penting karena dengan adanya infrastruktur dapat memudahkan wisatawan untuk berkunjung. Dengan adanya infrastruktur yang sudah memadai dapat menjadi pendukung dalam pariwisata. Berdasarkan hasil wawancara kepada perangkat desa yang mengatakan bahwa untuk infrastruktur di desa sudah beberapa dilakukan perbaikan di setiap tahun. Sedangkan menurut salah satu masyarakat yang berpendapat sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk infrastruktur di Desa Keditan sudah cukup memadai.

Pemasaran Pariwisata Desa Keditan

Pemasaran dalam dunia pariwisata sangat diperlukan untuk meningkatkan jumlah wisatawan serta memperkenalkan wisata tersebut lebih luas. Adapun bentuk-bentuk pemasaran yaitu *offline* dan *online.* Dalam pemasaran *offlin*e salah satunya dari mulut ke mulut sedangkan *online* melalui beberapa media sosial seperti *facebook*, *instagram*, dan *web.* Saat ini di Desa Keditan mengenai pemasaran dari perangkat desa serta masyarakat sudah melakukan pemasaran akan tetapi masih belum optimal. Karena keterbatasan pengetahuan masyarakat Desa Keditan terhadap teknologi.

Penyediaan Layanan Sosial dan Lingkungan serta Pembuangan Limbah Energi dan Air

Pembangunan wisata tidak hanya dari segi akses, akan tetapi dari segi penyediaan pembuangan limbah dan penyediaan layanan sosial untuk mendukung wisata yang lebih baik. Desa Keditan sejauh ini untuk penyediaan layanan sosial, lingkungan dan pembuangan energi belum ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan mbakYuli yang mengatakan "untuk layanan sosial, lingkungan, pembuangan limbah energi dan air di Desa Keditan sementara ini

belum ada". Adapun dari sudut pandang masyarakat yang juga berpendapat yang sama. Berdasarkan hal tersebut sejauh ini pembuangan energi di Desa Keditan belum ada disediakan oleh Pemerintah Desa tersebut.

Layanan Informasi Desa Keditan

Layanan informasi dalam pariwisata merupakan faktor untuk mendukung pariwisata karena dengan adanya layanan informasi dapat membantu pemerintah desa memberikan informasi kepada wisatawan dan begitu juga sebaliknya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu perangkat desa yaitu Pak Santo yang mengatakan "untuk sementara layanan informasi masih bertempat di kantor desa dan kita juga sudah punya banyak teman untuk memfasilitasi informasi. Sedangkan masyarakat lain ada yang pendapatnya hampir sama dengan perangkat desa. Namun, dari masyarakat yang lainnya mengatakan memang belum ada kantor layanan informasi khususnya untuk pariwisata. Berdasarkan dengan hasil observasi dan wawancara tersebut mengenai layanan informasi memang belum ada tetapi untuk sementara kantor lurah sebagai layanan informasi karena untuk layanan informasi online belum ada.

Kerjasama dengan *Stakeholders* dalam Pembangunan Pariwisata

Pariwisata yang dibangun tidak hanya berdiri sendiri tetapi perlu adanya kerjasama dengan *stakeholder* agar pembangunan pariwisata dapat berjalan dengan baik dan dapat membuka wawasan yang lebih luas lagi tentang pariwisata. Salah satu contohnya Desa Keditan yang memulai dari awal pembangunan wisata telah membangun kerjasama dengan kampus UKSW dan awal terbangunnya kerjasama desa dengan UKSW karena Desa Keditan memiliki potensi wisata yang tinggi dan perlu dikembangkan. Tidak hanya itu beberapa dari perangkat desa juga berpendapat bahwa bekerjasama dengan UKSW dapat membantu dalam pengembangan Desa Wisata. Selain itu, dari salah satu sudut pandang masyarakat juga berpendapat bahwa dalam pembangunan wisata perlu adanya kerjasama dengan banyak orang karena pariwisata membutuhkan banyak orang misalnya dari UKSW. Pemuda desa, PKK desa, Karang Taruna, serta masyarakat yang lainnya juga mengatakan bekerjasama dengan UKSW dan bahkan hasil observasi peneliti juga dari awal pembangunan pariwisata Desa Keditan sampai saat ini masih bekerjasama dengan UKSW dengan memberikan pelatihan, survei lokasi wisata dan membuatkan konsep untuk pariwisata Desa Keditan.

Pendanaan untuk Pembangunan Pariwisata Desa Keditan

Pembangunan pariwisata perlu adanya pendanaan untuk mendukung pembangunan pariwisata yang akan dibangun khususnya di Desa Keditan yang sedang dalam tahap pembangunan yang membutuhkan pendanaan cukup

banyak.Untuk mengetahui sistem pendanaan Desa Keditan peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada perangkat desa yaitu kepada bapak lurah yang mengatakan "dari perencanaan anggaran sudah dipersiapkan untuk pembangunan wisata dan sudah kita mulai dari kemarin 2019 untuk membangun gapura, pengadaan listrik dan sebagainya". Adapun dari beberapa masyarakat yang lainnya berpendapat sama dengan perangkat desa. Berbeda lagi dari salah satu sudut pandang masyarakat mengenai pendanaan untuk wisata masih sekedar wacana dan belum mengetahui seperti apa kelanjutannya. Berdasarkan hal tersebut sebagian dari masyarakat memang belum mengetahui dan bahkan tidak mengerti alur pendanaan pariwisata untuk Desa Keditan tetapi masyarakat hanya melihat bukti dana dari bentuk pembangunan infrastruktur wisata.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Simpson (2007) menyatakan bahwa peranan pemerintah salah satunya dengan mengadakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Desa Keditan telah melaksanakan peranan tersebut dengan melakukan pelatihan tentang pengelolaan pariwisata. Namun sejauh ini untuk sumber daya manusia di Desa Keditan masih terbatas sehingga pemerintah desa melakukan kolaborasi dengan pihak yang ahli dalam pariwisata yaitu dengan menggandeng kampus UKSW untuk mendampingi dalam kegiatan pelatihan. Saat ini pemerintah desa sudah berinisiatif dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Sejauh ini pembangunan pariwisata di Desa Keditan sudah cukup baik, hal ini terlihat dari masyarakat sudah banyak yang sadar akan adanya pariwisata, tetapi masih memiliki kekurangan yaitu adanya selisih paham dari beberapa masyarakat dengan pemerintah desa dan juga mayoritas masyarakat Desa Keditan sebagian besar bekerja sebagai petani sehingga menghambat kegiatan pelatihan. Sehingga perlu ditingkatkan lagi yaitu dengan melibatkan masyarakat untuk ikut dalam pelatihan yang diadakan dan lebih sering mengadakan kegiatan pariwisata agar masyarakat lebih termotivasi untuk aktif.

Peranan pemerintah dalam membuat kebijakan dengan memberikan wewenang kepada masyarakat dan membentuk struktur untuk membantu dalam pengelolaan pariwisata. Di Desa Keditan peran pemerintah untuk mendukung pembangunan pariwisata dengan membuat kebijakan/peraturan tentang ketenagakerjaan pariwisata dan lingkungan tetapi untuk sejauh ini di Desa Keditan belum ada dibentuk ketenagakerjaan. Hal ini juga dikatakan oleh (Hall, 1999; UNWTO, 1998, 2005) pemerintah perlu menciptakan peluang dan mendorong masyarakat untuk ikut terlibat dalam ketenagakerjaan tersebut.

Ketenagakerjaan di Desa Keditan saat ini belum bisa dikatakan baik karena belum ada penetapan tenagakerja untuk pariwisata. Sehingga dapat dikatakan bahwa Desa Keditan masih memiliki keterbatasan dalam ketenagakerjaan. Sejauh ini mengenai ketenagakerjaan Desa Waisata Keditan yang harus ditingkatkan yaitu masih membutuhkan pendampingan yang penuh dalam pembangunan dan mengelola pariwisata dengan baik. Serta, melakukan praktik langsung tentang pengelolaan pariwisata agar tenagakerja dapat memahami secara detail.

Peranan Pemerintah adalah menyediakan lahan untuk pembangunan pariwisata. Contohnya pemerinth desa telah menyiapkan lahan khusus untuk dimfantaatkan bagi pariwisata. Adapun penentu lahan pariwisata ini memang sudah disepakati oleh seluruh pihak perangkat desa, pemangku kepentingan dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman satu dengan yang lainnya.

Pemerintah desa dan masyarakat dapat dikatakan sebagai pemilik lahan dan pengambilan keputusan tentang lahan. Pembangunan pariwisata dibutuhkan lahan yang baikuntuk pariwisata yang bersifat jangka panjang. Lahan pariwisata di Desa Keditan dapat dikatakan sudah baik dilihat dari masyarakat dan pemerintah desa yang sudah memiliki kesepahaman dalam penentuan lahan pariwisata. Namun masih memiliki kekurangan mengenai masalah kebersihan dilahan wisata dilihat dari pengunjung yang datang membuang sampah sembarang karena belum ada tempat sampah yang memadai. Sehingga perlu menyediakan tempat sampah yang memadai dan mengajarkan wisatawan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan ketika berkunjung kewisata Desa Keditan.

Simpson (2007) salah satu peranan pemerintah ialah membuat kerangka kerja kebijakan dan peraturan. Desa Keditan sudah merancang kerangka kerja kebijakan dan peraturan serta membuat perencanaan dalam bentuk konsep untuk pembangunan pariwisata dan dalam pembentukan kerangka kerja pemerintah desa berperan penuh serta bekerjasama dengan pihak yang lebih ahli dalam bidang pariwisata. Sejauh ini di Desa Keditan mengenai kerangka kerja sudah cukup baik dilihat dari tahap pembangunan pariwisata yang sudah dibangun yaitu gapura dan loket masuk. Namun yang masih kurang ialah pelaksanaan di lapangan yang belum optimal. Desa Keditan sejauh ini sudah memiliki kerangka kerja dalam bentuk konsep, tetapi masih ada yang perlu ditingkatkan yaitu pendampingan untuk pelaksanaan kerangka kerja yang telah dibuat.

Simpson (2007) menyatakan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata adalah untuk menyediakan infrastruktur dan komunikasi. Pemerintah Desa Keditan sudah menyediakan infrastruktur di desa baik dari akses menuju ke lokasi bahkan gapura dan loket. Penyediaan infrastruktur ini pemerintah desa lebih mengajak masyarakat untuk menjaga

fasilitas serta pemerintah juga membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar hubungan masyarakat dengan pemerintah desa lebih dekat lagi.

Pembangunan pariwisata di Desa Keditan mengenai infrastruktur di Desa Keditan sudah cukup baik, dilihat dari segi akses jalan yang sudah diperbaiki seperti jalan di desa maupun jalan ke lokasi wisata seperti gapura dan loket. Namun ada juga kekurangan yang dimiliki dari segi infrastruktur Desa Keditan yaitu penunjuk arah, infrastruktur di kawasan wisata belum ada, dilihat dari kawasan wisata yang masih sangat alami dan belum terjamah. Pembangunan pariwisata di Desa Keditan dari segi infrastrukturnya masih perlu ditingkatkan lagi dengan membuat arah penunjuk jalan agar pengunjung tidak tersesat. Selain itu, membangun secara bertahap infrastruktur di kawasan wisata.

Internet merupakan sebuah sarana pemasaran untuk memperkenalkan pariwisata. Hal ini dilihat dari Pemerintah Desa Keditan yang telah melakukan pemasaran dalam bentuk *online* dan *offline.* Contohnya pemasaran *offline* dalam pemasaran produk lokal (usaha rumahan masyarakat), promosi dari mulut ke mulut, tetapi dalam hal tersebut pemasaran di Desa Keditan masih memiliki kekurangan yaitu masih kurang dalam memasarkan pariwisata Desa, sehingga pemasaran masih dalam lingkup kecil saja. Hal yang perlu ditingkatkan ialah melakukan pemasaran di sosial media lebih produktif lagi dengan konten yang menarik dan kedepannya pemerintah desa membuat pemasaran yang lebih luas dalam bentuk spanduk, brosur, serta pemasaran melalui produk-produk lokal.

Penyediaan layanan sosial, lingkungan serta pembuangan limbah merupakan salah satu peran pemerintah Desa. Namun sejauh ini pemerintah Desa Keditan belum menyediakan layanan tersebut dikarenakan Desa Keditan saat ini memang masih dalam tahap pembangunan dari awal. Desa Keditan untuk saat ini masih belum memiliki tempat pembuangan limbah energi dan air. Namun sejauh ini kebersihan di setiap dusun masih cukup bersih dilihat dari inisiatif masyarakat untuk menyediakan pembuangan energy dan air di setiap rumah. Oleh karena itu, pemerintah desa sebaiknya menyediakan pelayanan sosial, lingkungan dan pembuangan limbah energi dan air. Selain itu, mengajak masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan sekitar.

Pemerintah Desa Keditan sudah menyediakan layanan informasi tetapi masih bersifat sementara dan pemerintah desa juga terbuka untuk memberikan layanan informasi bagi yang berkunjung. Hal ini juga sesuai yang dinyatakan oleh Simpson (2007) bahwa dengan menerapkan layanan informasi transparan baik bagi *stakeholder* dan pengunjung. Layanan informasi di Desa Keditan sudah cukup baik karena dilihat dari perangkat desa dan masyarakat dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan. Tetapi kekurangan dari layanan informasinya ialah

belum adanya kantor yang tetap, jangkauan informasi online masih sangat kurang karena terbatasnya jaringan di Desa Keditan. Layanan informasi Desa Keditan masih perlu untuk ditingkatkan seperti membangun layanan informasi yang tetap, membuat layanan informasi melalui online yang dapat memberikan informasi sesuai yang dibutuhkan.

Desa Keditan sejauh ini telah membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan baik yang di dalam dan di luar desa. Hal tersebut dapat dilihat dari pemerintah desa yang sudah membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan luar seperti dengan institusi pedidikan tinggi seperti UKSW, Universitas Islam Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan yang lainnya. Selain itu, Kerjasama dengan pihak luar juga dibangun dengan pemerintah Kecamatan dan Kabupaten Magelang. Pemerintah Desa Keditan juga merangkul dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan setempat, seperti PKK, Pemuda, dan yang paling penting ialah dengan dengan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah desa Keditan telah melakukan peran seperti yang dinyatakan oleh Simpson (2007) bahwa Pemerintah Desa membangun kolaborasi dengan Sektor Pemerintah, Swasta dan juga LSM.

Desa Keditan sejauh ini sudah sangat baik dalam membangun kerjasama dengan *stakeholder* dilihat dari pemerintah desa dari awal perencanaan dan pembangunan wisata sudah menggandeng salah satu instansi yaitu UKSW. Namun masih ada kekurangan yang dimiliki yaitu dari kolaborasi pemerintah desa dengan stakeholder yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia di Desa Keditan. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan lagi untuk membangun ubugan yang baik dengan masyarakat.

Simpson (2007) mengatakan pembangunan pariwisata membutuhkan pemerintah desa untuk memastikan keberlanjutan pembangunan pariwisata. Pemerintah Desa Keditan berperan dalam membuat pendanaan untuk pembangunan pariwisata dan juga membuat transparansi dana bagi masyarakat untuk pembangunan wisata. Hal ini juga dikatakan oleh (Ashley,1998; Poultney dan Spanceley, 2001) menyatakan bahwa pemerintah berkontribusi dalam pembangunan dan membuat pendanaan.

Pemerintah Desa Keditan juga bekerjasama dengan Kecamatan dan Kabupaten untuk membantu pendanaan pariwisata. Sejauh ini pendanaan pariwisata di Desa Keditan sudah sangat baik karena dari perangkat desa sendiri yang langsung membuat perincian dana untuk pembangunan pariwisata di Desa Keditan dan bahkan sudah ada beberapa pembangunan yang sudah terlaksana. Namun, masih memiliki kekurangan yaitu pelaksanaan pembangunan belum optimal dan keterbatasan sumber daya manusia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan 10 potensi peran pemerintah, Desa Keditan telah melaksanakan 4 (empat) peran secara optimal. Keempat peran tersebut meliputi pelaksanaan pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas, penyediaan lahan pembangunan pariwisata, perbaikan infrastruktur serta kolaborasi dengan *stakeholder*. Sedangkan peran pemerintah yang belum berjalan secara optimal meliputi layanan informasi, pemasaran pariwisata, dan kerangkakerja kebijakan/peraturan. Namun, ada 2 (dua) peran pemeritah desa yang belum terlaksana yaitu penyusunan kebijakan/peraturan ketenagakerjaan dan penyediaan layanan sosial, lingkungan serta pembuangan limbah energi dan air. Hal ini disebabkan oleh pemerintah desa yang masih berfokus pada pembangunan infrastruktur pariwisata. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa dalam keterbatasan pengetahuan tentang pariwisata, pemerintah Desa Keditan telah berinisiatif untuk berperan dalam membantu masyarakatnya. Namun demikian, peran pemerintah desa dalam membangun Desa Keditan dapat dikatakan belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi.

Saran

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pemerintah desa antara lain (1) Pemerintah Desa Keditan sebaiknya menyediakan layanan informasi agar memudahkan wisatawan untuk mendapatkan informasi. (2) Pemerintah desa disarankan untuk mempromosikan Desa Keditan dalam pengembangan pariwisata melalui sosial media seperti*, Instagram, facebook*, dan *website*. (3) Pemerintah desa dengan berkolaborasi dengan pihak terkait meningkatkan pendampingan kepada masyarakat untuk pelaksanaan kerangka kerja yang telah dibuat. (4) Disarankan untuk menyusun kebijakan/peraturan desa tentang ketenagakerjaan pariwisata yang menjamin kesejahteraan masyarakat desa. (5) Memperkuat dan memperluas kolaborasi dengan pemangku kepentingan di bidang pariwisata.

REFERENSI

Ali, S., Rose Alinda, A., Syed Norris, H., Marlia, P., Siti Hamisah, T., Cotet, G. B., Balgiu, B. A., Zaleschi (Negrea), V. – C., Matusevych, T., Abu Ahmad, I., Teknologi, U., Bandar, M., Abdul, T., Pahang, R., Pendidikan, F., National Education Association (NEA), Information Management Department, HASSAN, C. N. B., Luthfi, A., … Othman, A. (2018). https://doi.org/10.1051/matecconf/201712107005

Bruno, L. (2019). *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Gulo, W. (2002). Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 59–68.

Ii, B. a B., & Sistem, a P. (2001). *Universitas Sumatera Utara 7*. 7–37.

Iii, B. A. B., Metode, A., Penelitian, P., & Penelitian, M. (2007). *Yuga Teguh Muharam, 2013 Kajian Tentang Keasadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu*

Magee, R. V., سلامة.م, Magee, R. V., Crowder, R., Winters, D. E., Beerbower, E., Bodhi, B., Schindler, S., Pfattheicher, S., Reinhard, M.-A., Haddock, G., Foad, C., Windsor-Shellard, B., Dummel, S., Adarves-Yorno, I., Furlotte, C., & Gorski, P. C. (2017). No Titleالاجراءات الجنائية. *ABA Journal*, *102*(4), 24–25. https://doi.org/10.1002/ejsp.2570

Munawaroh, R. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Taman Nasional Gunung Merbabu Community Participation in the Development of Community-Based*. 374–389.

Sastrayuda, G. S. (2010).*Pariwisata Berbasis Masyarakat(Community Based Tourism)*. 1–17.

Simpson, M. C. (2008). Community Benefit Tourism Initiatives - A conceptual oxymoron? *Tourism Management*, *29*(1), 1–18. https://doi.org/ 10.1016/ j.tourman.2007.06.005